

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Gangguan keamanan, ketertiban, dan kriminalitas merupakan gejala sosial yang normal dan sering terjadi di masyarakat. Bahkan telah menjadi kebiasaan bagi para pelanggar untuk terus melakukan hal yang dapat mengganggu masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pengamanan untuk mengatasi gangguan-gangguan yang dapat merugikan masyarakat tersebut.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri dilaksanakan melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian yang merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Sesuai ketentuan konstitusi, penyelenggaraan keamanan dalam negeri dilaksanakan melalui sistem keamanan yang bersifat menyeluruh dengan Polri sebagai kekuatan utama dengan melibatkan masyarakat sebagai pendukung (Lihawa & Mustofa, 2010, hlm. 1).

Menurut Kunarto (1997b, hlm. xl) kode etik kepolisian republik Indonesia terbagi menjadi tiga bagian utama, diantaranya adalah:

1. Mengabdikan kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban dan kemaan demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin.
3. Menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat.
4. Memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sebagai negara demokrasi, maka penyelenggaraan fungsi kepolisian harus didasarkan pada prinsip-prinsip pemolisian demokratis yang terutama ditandai dengan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini akan melahirkan sebuah keamanan yang terjamin bagi masyarakat serta pemerintahan dalam suatu negara. Untuk menanggulangi gangguan keamanan, ketertiban, serta kriminalitas yang mungkin timbul, maka diperlukan

penyelenggaraan fungsi kepolisian yang handal dan mempunyai daya cegah yang tinggi (Lihawa & Mustofa, 2010, hlm. 2-3).

Secara fungsional polisi dituntut untuk melaksanakan tugas dengan sikap etis, adil dan ramah, serta memberikan layanan dan menjaga ketertiban. Tetapi, masyarakat telah lama kehilangan kepercayaan kepada polisi. Hal ini terkait dengan penindakan yang bersikap tidak etis, adil dan ramah, bahkan menggunakan kekuatan institusi untuk melakukan kekerasan.

Menurut Kurnia (2013, hlm. 1) dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini kepolisian mengalami penyimpangan fungsi dan kewenangan sebagai penjaga keamanan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan berita yang termuat dalam "Radar Makassar edisi 13/04/2015 edisi cetak, headline/ Radar dengan judul *kembalikan tupoksi Polri*". Di dalam media cetak tersebut disebutkan bahwa seorang ketua RW 08 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini yang bernama M. Saleh mengungkapkan bahwasannya saat ini pihak kepolisian tidak ingin lagi menangani persoalan kecil yang meresahkan masyarakat (Radar Makasar, 2015).

Hal ini diperkuat dengan data dari Kasubbid Provos Kepolisian Daerah Jawa Barat perihal pelanggaran disiplin dan pidana personil Polri se-Jawa Barat dari tahun 2012 hingga 2015. Data tersebut yaitu sebagai berikut:

Hal ini diperkuat dengan data dari Kasubbid Provos Kepolisian Daerah Jawa Barat perihal pelanggaran disiplin dan pidana anggota dan PNS Polri se-Jawa Barat dari tahun 2012 hingga 2015. Data tersebut terdapat dalam tabel 1:

Dalam struktur kepolisian terdapat kode etik yang harus ditaati dan dijalani oleh setiap anggota kepolisian yang bertujuan untuk menjadikan dasar perilaku polisi yang ideal. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih saja ada perilaku-perilaku dari oknum polisi yang menyimpang dan meresahkan warga.

Tabel 1

Data Garpin Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015

NO.	TAHUN	JENIS PELANGGARAN		JUMLAH
		DISIPLIN	PIDANA	
1	JAN-DES 2012	1043	53	1096
2	JAN-DES 2013	971	38	1009
3	JAN-DES 2014	912	36	948
4	JAN-DES 2015	538	10	556
	TREND			TURUN

Sumber: DP

Menurut Kunarto (1997a, hlm. 3) dalam mengamalkan kode etik atau suatu ajaran biasanya melalui proses; mengerti, memahami, menghayati, mengamalkan, yang merupakan urutan yang tidak boleh diputar balikan. Para senior Polri banyak yang berpendapat bahwa Kode Etik Polri itu dimasa sekarang ini baru sampai tahap dimengerti oleh sebagian besar warga Polri. Karenanya dapat dimengerti jika secara umum perilaku mereka itu tidak bersifat etis, yang menyebabkan merebaknya kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya. Banyaknya tindakan kekerasan, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain, yang menyebabkan meluasnya kecaman serta merosotnya citra Polri merupakan bukti dari konstataasi (hak untuk menetapkan gejala atau tanda-tanda di suatu keadaan) tersebut.

Problema yang sangat mendasar adalah bagaimana cara terbaik untuk menginternalisasikan Etika Polri yang terarah dan yang menjadikan dasar perilaku polisi yang ideal (Kunarto, 1997a, hlm. 7):

1. Agar mempermudah internalisasi dipersyaratkan individu Polri itu harus memiliki struktur kepribadian yang baik dalam arti egonya kuat dan seperegonya sehat.
2. Diperlukan lagi materi (ajaran) etika termasuk referensi yang mantap dan terbuka untuk dikembangkan, ditelaah dan dianalisa.
3. Etika memang harus dipompakan, ditanam. Dikembangkan ke dalam hati nurani, kalbu melalui pendidikan, khususnya pendidikan pembentukan (*preservice training*).

4. Pendidikan sebenarnya hanya bermakna penanaman, sedang pemeliharaan, penumpukan dan pengembangan banyak waktu terjadi didalam praktek pelaksanaan tugas.

Perlu adanya aktualisasi dari proses etika yang dijalankan oleh para anggota kepolisian, pada prinsipnya aktualisasi itu terwujud atau terefleksikan dalam perilaku positif individu polisi. Bekerja keras, tekun, rajin, haus pengetahuan, selalu siap siaga setiap saat, yang paling utama adalah selalu berfikir positif dan beritikad baik. Bekerja keras dan itikadnya tidak baik akan merusak semua karya positif yang pernah dilakukan (Kunarto, 1997a, hlm. 9).

Menurut Baldwin & Kinsey (2002, hlm. xiii dan xiv) banyak pihak telah mendalami tentang apa sebenarnya masalah-masalah kepolisian yang ada, agar polisi dapat bekerja dengan baik. Tidak satu pihak pun menemukan secara pasti, lengkap dan jelas. Karena masalah itu, sedemikian luasnya, seluas masalah masyarakat itu sendiri. Berbagai komisi telah dibentuk di Inggris yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pertama kali ditemukan pendapat bahwa polisi akan bekerja efektif apabila dicukupi kebutuhan Trinitas.
2. Komisi selanjutnya menemukan bahwa di samping hal-hal di atas terdapat masalah pengembangan.

Kunarto (1997a, hlm. 11) menjelaskan bahwa lahirnya citra buruk atau kegagalan pelaksanaan tugas polisi, berawal dari penyimpangan etika atau tidak memegang teguh kode etik. Dalam berbagai literatur, penyimpangan kode etik disebut juga sebagai perbuatan yang tidak berakhlak, yang dilingkup kepolisian universal diidentifikasi sebagai perbuatan-perbuatan tidak jujur, kekerasan yang kejam, penerimaan hadiah, penahanan ilegal, penggeledahan yang tidak sah dan perilaku yang tidak sopan.

Pada penyimpangan polisi, dengan menyalahgunakan wewenang yang dimiliki akan mendorong terjadinya pemudaran wibawa polisi. Memudarnya wibawa polisi akan mengarah kepada suatu ketidak stabilan keamanan, yang bukan tidak mungkin akan mendorong tindakan anarkis. Memudarnya wibawa polisi ini sama artinya menyeret kembali Polri kembali ke dalam situasi yang

tidak menguntungkan, bahkan akibat penyimpangan yang dilakukan oleh oknum polisi dapat mengakibatkan dampak kekerasan bagi masyarakat.

Friedrich (dalam Kunarto, 1994, hlm. 6) mendefinisikan bahwa kekerasan polisi adalah pemakaian kekuatan oleh polisi termasuk semua kegiatan yang menggunakan kekuatan, baik sah maupun tidak sah yang dapat menghasilkan kerugian fisik dan emosional.

Penyimpangan perilaku polisi merupakan gambaran umum tentang kegiatan petugas polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas, wewenang organisasi, nilai dan standar perilaku sopan (yang biasanya dilaksanakan, bukan dikatakan). Penyimpangan dapat mencakup banyak perilaku yang dapat dilakukan petugas (Kunarto, 1994, hlm. 4).

Penyimpangan perilaku polisi terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang yang dilakukan selama serangkaian kegiatan tugas normal atau dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi.
2. Penyalahgunaan wewenang adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, atau melanggar hak-hak hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan pekerjaan polisi.

Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum polisi, mengindikasikan adanya kesenjangan antara kode etik polisi atau harapan bagaimana polisi seharusnya dengan realita yang ada di lapangan. Kesenjangan yang terjadi tentunya bukan tanpa sebab, menurut peneliti ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan yaitu faktor dari dalam diri dan faktor dari luar. Faktor dari dalam diri diantaranya adalah ketidaksanggupan individu untuk menyesuaikan diri dengan tugas polisi yang diampunya, keinginan untuk dipuji dan kondisi mental yang kurang sehat.

Sedangkan faktor dari luar diantaranya adalah kebutuhan ekonomi, lingkungan yang kurang baik dan kurangnya pemahaman tentang agama. Menurut peneliti sebab yang paling krusial adalah kurangnya pemahaman tentang agama.

Oleh karena itu, suatu tanggung jawab lembaga Polri untuk meminimalisasi tindakan-tindakan penyimpangan polisi adalah dengan melakukan suatu pembinaan terhadap akhlak masing-masing pribadi polisi. Sebenarnya di

Kepolisian Daerah Jawa Barat telah ada kegiatan pembinaan keislaman yang diperuntukan bagi anggota dan PNS Polri, pembinaan keislaman tersebut bersifat rutin setiap harinya berupa kultum dan pembinaan mingguan setiap hari kamis berupa ceramah dengan waktu yang lebih lama dari kegiatan harian.

Pembinaan menurut Gafur (1978, hlm. 7) adalah upaya pendidikan yang dilakukan baik secara formal maupun non formal secara sadar, terarah dan bertanggung jawab dengan maksud mengembangkan kepribadian secara seimbang dan utuh agar menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan menurut Syarif (1991, hlm. xii) pembinaan adalah suatu proses untuk membantu seseorang untuk membentuk, meningkatkan dan mengubah pengetahuan, keterampilan sikap dan tingkah lakunya agar dapat mencapai standar tertentu.

Dengan demikian pembinaan merupakan upaya mengembangkan kepribadian seseorang melalui pendidikan yang dapat merubah sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Pembinaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah upaya mengembangkan kepribadian melalui pembinaan keislaman.

Pembinaan keislaman diarahkan untuk memperkuat keyakinan para polisi. Arifin (1985, hlm. 25) berpendapat bahwa pembinaan keislaman bisa dikatakan juga sebagai bimbingan konseling islami. Namun, menurutnya pembinaan keislaman atau bimbingan konseling islami di negara kita belum diterapkan. Oleh karena itu kegiatan pembinaan keislaman ini harus dilakukan secara mandiri oleh lembaga, dalam ranah pendidikan tentunya yang berwenang melakukan pembinaan keislaman adalah guru-guru pendidikan agama islam. Sedangkan dalam sebuah lembaga atau institusi tentunya yang berwenang melakukan pembinaan keislaman adalah *stack holder* (pemangku kebijakan) yaitu pemimpinnya sendiri.

Maka, pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pembinaan keislaman yang diterapkan di Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam rangka meningkatkan akhlak masing-masing pribadi polisi. Sehingga peneliti tertarik untuk memilih judul **“Pembinaan keislaman Bagi Anggota dan PNS Polri Di Kepolisian Daerah Jawa Barat”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rincian rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran umum pembinaan keislaman bagi anggota dan PNS Polri di Kepolisian Daerah Jawa Barat?
2. Bagaimana perencanaan program pembinaan keislaman bagi anggota dan PNS Polri di Kepolisian Daerah Jawa Barat?
3. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan keislaman bagi anggota dan PNS Polri di Kepolisian Daerah Jawa Barat?
4. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat program pembinaan keislaman bagi anggota dan PNS Polri di Kepolisian Daerah Jawa Barat?
5. Bagaimana evaluasi program pembinaan keislaman bagi anggota dan PNS Polri di Kepolisian Daerah Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui gambaran umum pembinaan keislaman bagi anggota dan PNS Polri di Kepolisian Daerah Jawa Barat?
2. Mengetahui perencanaan program pembinaan keislaman bagi anggota dan PNS Polri di Kepolisian Daerah Jawa Barat.
3. Mengetahui pelaksanaan program pembinaan keislaman bagi anggota dan PNS Polri di Kepolisian Daerah Jawa Barat.
4. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat program pembinaan keislaman bagi anggota dan PNS Polri di Kepolisian Daerah Jawa Barat.
5. Mengetahui evaluasi program pembinaan keislaman bagi anggota dan PNS Polri di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa data yang diperoleh tentang pembinaan keislaman di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

2. Manfaat Praktis

Bella Moriska, 2016

PEMBINAAN KEISLAMAN BAGI ANGGOTA DAN PNS POLRI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Bagi Civitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan penelitian bagi peneliti lainnya.
- b. Bagi Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media informasi tentang cara pembinaan keislaman di sebuah lembaga.
- c. Bagi Institusi Kepolisian Daerah Jawa Barat
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam setiap kegiatan keislaman yang ada di Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- d. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca untuk mengetahui pembinaan keislaman yang ada di Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- e. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan tentang pembinaan keislaman di Kepolisian Daerah Jawa Barat serta sebagai bahan latihan dalam penulisan karya tulis.

B. Struktur Organisasi Skripsi

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Struktur Organisasi Skripsi.

Bab II Kajian Teori, dalam bab ini terdiri dari penyajian teori tentang konsep pembinaan dan kepolisian.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas tentang desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, definisi operasional, pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Temuan dan Bahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil pengolahan data serta analisis data yang sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, dalam bab terakhir penelitian ini membahas tentang kesimpulan dari seluruh penelitian, implikasi dan rekomendasi serta lampiran-lampiran yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

Bella Moriska, 2016

PEMBINAAN KEISLAMAN BAGI ANGGOTA DAN PNS POLRI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bella Moriska, 2016

PEMBINAAN KEISLAMAN BAGI ANGGOTA DAN PNS POLRI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu